



LAPORAN KINERJA (LKj) » TAHUN 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2026**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk menjamin penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan hasil evaluasi dan penilaian capaian kinerja terhadap sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 1 (satu) tahun.

- KEDUA** : Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertujuan untuk:
- a. Pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun.
 - b. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - c. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja (LKj), tim yang bertugas memiliki hak dan kewenangan meminta data, informasi dan/atau referensi yang dibutuhkan ke unit kerja lain dalam satu perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 05 Februari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



HARONI, SP

Pembina Utama Muda/TV c

NIP. 19680324 199403 1 005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah menjadi kontrak kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Bupati Bengkulu Selatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari 5 indikator kegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan memperlihatkan hasil yang sangat baik.

Namun demikian, masih dirasa perlu dilakukan perbaikan guna penyempurnaan di masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Manna, 05 Februari 2026

Kepada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



HARONI, SP

NIP. 19680324 199403 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja tahun awal perencanaan dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good government).

Seiring dengan upaya merealisasikan good government, Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026. Pembangunan ketahanan pangan secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dari target kinerja program/kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran akan dievaluasi capaian kinerjanya sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan

hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis yang telah ditetapkan dengan tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan Bengkulu Selatan tahun 2025, total ketersediaan energi per kapita perhari adalah 3.417 kkal/kap/hari, ketersediaan protein 120,40 gram/kap/hari, dan lemak 54,59 gram/kap/hari. Sehingga didapatkan Skor PPH Ketersediaan sebesar **93,00** dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein sebesar 63 gram/kap/hari.
2. Berdasarkan peta FSVA Tahun 2025, didapatkan 1 desa yang termasuk dalam prioritas I yaitu Ds. Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna, 6 desa yang termasuk pada prioritas II (Ds. Batu Ampar Kec. Kedurang, Ds. Cinto Mandi Kec. Pina Raya, Ds. Kembang Seri Kec. Pina Raya, Ds. Padang Mumpo Kec. Pina, Ds. Batu Pango Kec. Ulu Manna dan Ds. Air Tenam Kec. Ulu Manna), dan 17 desa prioritas III, 82 desa prioritas IV, 44 desa prioritas V, dan 8 desa/kelurahan yang masuk dalam prioritas VI. Dari peta FSVA tersebut didapatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sebesar **74,73**.
3. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan melakukan pembagian bibit tanaman sayuran, kompos, pupuk NPK, dan polybag yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Desember Tahun 2025. Bibit dan sapras tersebut disalurkan di 6 desa yang termasuk dalam lokus stunting. 6 (enam) desa tersebut

antara lain : 1. KWT Cempaka Putih Desa Darat Sawah Kec. Seginim, 2. KWT Usaha Baru Desa Sukarami Kec. Air Nipis, 3. KWT Teratai Putih Desa Sukamaju Kec. Air Nipis, 4. KWT Harapan Maju Desa Tanjung Beringin Kec. Air Nipis. 5. KWT Mekar Jaya Desa Talang Padang Kec. Pino Raya, 6. KWT Melati Desa Padang Serasan Kec. Pino Raya. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan juga mempunyai demplot pekarangan halaman kantor sebagai percontohan bagi karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

4. Pola Pangan Harapan (PPH) disusun berdasarkan data SUSENAS Tahun 2025. Berdasarkan data analisa konsumsi pangan, total konsumsi energy aktual sebesar 2.045 kkal/kap/hari, dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan didapatkan Skor PPH konsumsi tahun 2025 sebesar **92,31**.

5. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan dengan menggunakan rapid test kit untuk mengetahui kandungan pestisida dan formalin pada sample yang diuji. Pengawasan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali yang dilaksanakan di 4 lokasi yaitu pasar Kutau Kec. Kota Manna, 2. pasar Ampara Kec. Pasar Manna, 3. Pasar Nanjungan Kec. Pino Raya, 4. Pasar Babatan Kec. Seginim. Jadwal pelaksanaan pengawasan keamanan pangan tersebut yaitu 1. Pada bulan Maret di Pasar Kutau Kec. Kota Manna, 2. Pada bulan Oktober di Pasar Nanjungan Kec. Pino Raya, 3. Pada bulan November di Pasar Babatan Kec. Seginim, dan 4. Pada bulan Desember di Pasar Ampara Kec. Pasar Manna.

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan organik, baik di tingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Pada pengawasan 1, total

sampel yang diuji adalah sebanyak 6 (enam) sampel pangan segar. Dari 6 sample tersebut dilakukan pengujian pestisida dan didapatkan hasil bahwa semua sample aman dikonsumsi. Pada pengawasan ke-2, total sample yang diuji sebanyak 11 sample untuk pengujian organopospat dan formalin. Hasil pengujian untuk pengawasan ke-2, didapatkan hasil bahwa semua sample aman dikonsumsi. Pada pengawasan ke-3, total sample yang digunakan sebanyak 6 sample. Ke-6 sample tersebut akan dilakukan pengujian Organopospat dan didapatkan 1 sample yang positif (+) Organopospat yaitu cabe rawit dari Seginim. Pada pengawasan ke-4, total sample yang diuji sebanyak 6 sample. Ke-6 sample tersebut akan dilakukan pengujian Organopospat. Hasil pengujian pada pengawasan ke-4, didapatkan hasil bahwa semua sample aman dikonsumsi.

Selain itu, juga dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 2 kecamatan, yaitu di Kec. Pino Raya dan Kec. Air Nipis.

6. Jumlah Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak **26.793,58 Kg**. Pada Tahun 2024 dilakukan penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebanyak 1 kali penyaluran di bulan November 2025 sebanyak **2.448 Kg** yang pemanfaatannya untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 526.407 Tahun 2025 tanggal 27 Oktober 2025 yaitu di Kecamatan Kota Manna, Manna, Pino, Seginim, Pino Raya, Kedurang Ilir, dan Kedurang. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dititipkan di Perum Bulog.

Untuk Bantuan Pangan (BAPANG) Pemerintah Pusat dilaksanakan 4 (empat) bulan dengan 2 (dua) kali periode

penyaluran, yaitu Periode I untuk Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 berupa beras sebanyak 336.520 kg dan Periode II untuk Bulan Oktober dan November Tahun 2025 berupa beras sebanyak 328.840 kg dan minyak goreng sebanyak 65.768 liter.

7. Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota, dilakukan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di 4 gapoktan yaitu LDPM Simpati Desa Maras Kec. Air Nipis, LDPM Empat Serangkai Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang, LDPM Tiga Serangkai Desa Melao Kecamatan Manna, dan LDPM Sejahtera Desa Beringin Datar Kec. Pino.
8. Kegiatan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2025, dengan pemantauan dan pengamatan harga di tingkat produsen dan harga pedagang (pedagang grosir dan pedagang eceran). Di Pasar Harian Kecamatan Pasar Manna serta beberapa pasar yang ada di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain : Kec. Kota Manna, Kec. Pasar Manna, Kec. Manna, Kec. Bunga Mas, Kec. Kedurang, Kec. Kedurang Ilir, Kec. Seginim, Kec. Air Nipis, Kec. Ulu Manna, Kec. Pino, dan Kec. Pino Raya. Untuk pasar harian, dilakukan setiap hari, sedangkan untuk pasar mingguan yang ada di beberapa kecamatan dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu. Sehingga dalam 1 (satu) bulan pengamatan dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, dan untuk 1 (satu) tahun sebanyak 96 kali pengamatan. Jadi total pengamatan yang dilaksanakan di kecamatan dalam wilayah Kab. Bengkulu Selatan sebanyak 456 kali pengamatan/tahun. Hasil pengamatan langsung dikirim ke Aplikasi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional. Sedangkan untuk informasi harga pangan pangan pokok di Kabupaten Bengkulu Selatan

di informasikan melalui Media Sosial setiap hari. Komoditas pemantauan harga pangan tersebut antara lain : Beras premium, Beras medium (kg), Kedelai biji kering (impor) (kg), Bawang merah (kg), Bawang putih bonggol (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit merah (kg), Daging ayam ras (kg), Daging sapi murni (kg), Telur ayam ras (kg), Gula konsumsi (kg), Minyak goreng kemasan (kg), Tepung terigu (curah) (kg), Ikan tongkol (kg), Garam halus beryodium (kg), Tepung terigu kemasan (kg).

Operasi pasar dilakukan melalui monitoring harga pangan pokok di pasar harian dan pasar mingguan serta melaksanakan Gerakan Pasar Murah (EraGro) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Disamping itu, Gerakan Pasar Murah ini juga dilakukan atas dasar permintaan dari Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, serta Kerjasama melalui Bank Indonesia, Bank Bengkulu, dan Instansi Vertikal seperti POLRES BS, KODIM 0408 BS, KAJARI BS, dan Pengadilan Negeri BS. Sepanjang Tahun 2025, Gerakan Pangan Murah EraGro ini sudah dilaksanakan 110 kali yang menyebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dari hasil analisis kinerja Dinas Ketahanan pangan Tahun 2025, Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 **Baik** dengan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra SKPD sebesar **100%** dan Realisasi Anggaran sebesar **90,93%**. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan LKj	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj	4
1.4. Gambaran Umum PD	6
A. SOTK	6
B. Isu Strategis PD	14
C. Keadaan Pegawai	15
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	20
E. Keuangan	23
1.5. Sistematika LKj	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	27
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	27
B. Tujuan dan Sasaran PD	32
C. Strategi dan Arah Kebijakan	35
2.2. Perjanjian Kinerja	36
2.3. Rencana Anggaran PD	39
A. Target Belanja	39
B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama PD	45
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	52
3.3. Realisasi Anggaran	82
3.4. Inovasi Perangkat Daerah	87
3.5. Aktualisasi dan Implementasi Core Value BerAKHLAK.....	88
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Rekomendasi	91
Lampiran :	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Lain-lain yang dianggap perlu	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada Pangan yang didukung dengan program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau" dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata
2. Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien
3. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain :

1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat.
2. Teknologi pengolahan pangan lokal masih kurang.

3. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang.
4. Masih berkembangnya konsep makan "*belum makan, kalau belum makan nasi*".
5. Pemanfaatan dan produksi sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung dan sagu masih rendah.
6. Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja merupakan alat ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat karena didalamnya terlihat keberhasilan dan kegagalan dalam misi organisasi. Dalam upaya mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi secara berjenjang dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007). Dimana tugas pokok, fungsi dan Tata Kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 27 Tahun 2011). Dinas Ketahanan pangan didirikan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan modern, efisien, efektif dan berkesinambungan dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan ketahanan pangan, kefarmasian, alat ketahanan pangan dan PKRT serta sumber daya ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);

- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

1.2 Tujuan Penyusunan LKj

Laporan Kinerja tahun 2025 disusun guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan selama Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan Tugas dan fungsinya, yang merupakan implementasi dari misi Dinas Ketahanan Pangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4 Gambaran Umum PD

A. SOTK

Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

➤ Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

➤ Fungsi

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan system informasi;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Ketahanan Pangan, kefarmasian, alat Ketahanan Pangan dan PKRT serta sumber daya Ketahanan Pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- 6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris

➤ Tugas Pokok

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas.

➤ Fungsi

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- 2) Pengelolaan data dan informasi di bidang Ketahanan Pangan;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Ketahanan Pangan;
- 4) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- 5) Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatatalaksana di lingkungan dinas;
- 7) Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- 8) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- 9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan;

- 10) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang ketahanan pangan;
- 11) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
- 12) Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi kesekretariatan dijalankan oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - Fungsi
 - 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan

- dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - 5) Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan meliputi :

1. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Pangan;
 3. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - Fungsi
 - 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan;
 - 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 5) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi yaitu :

1. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
3. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.

5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

➤ Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi dinas di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

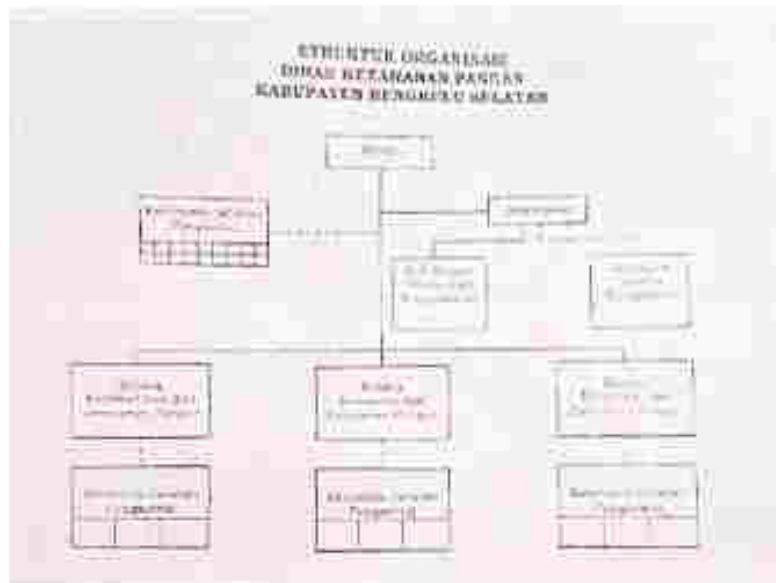
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :

1. Kelompok Substansi Distribusi Pangan;
2. Kelompok Substansi Harga Pangan;
3. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

Berikut Struktur organisasi PD.



B. Isu Strategis PD

Penentuan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ditentukan melalui pemetaan terhadap Lingkungan Internal yang meliputi : Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weaknesses*), dan Lingkungan Eksternal yang meliputi Peluang (*opportunities*) dan Tantangan (*threats*), sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Matrik Swot

Kekuatan (<i>strengths</i>)	Kelemahan (<i>weaknesses</i>)
1. Potensi lahan dan iklim yang mendukung untuk pemenuhan ketersediaan pangan	1. Data yang tersedia kurang lengkap dan kemampuan petugas belum memadai
2. Pengembangan kawasan sentra produksi dan agropolitan	2. Penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran belum optimal
3. Ketersediaan pangan pokok dalam daerah (beras) surplus	3. Rendahnya tingkat kesadaran terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
4. Adanya kelembagaan pangan masyarakat	4. Rendahnya tingkat kesadaran terhadap keamanan pangan
5. Adanya regulasi terkait Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	
6. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal	
7. Adanya inovasi yang sudah dikembangkan	

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>threats</i>)
1. Meningkatnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk 2. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu, baik dalam maupun luar negeri 3. Perdagangan bebas memungkinkan investor ikut andil dalam pengembangan sentra produksi dan agropolitan 4. Komitmen pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan 5. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian, pembinaan, dan pengembangan usaha	1. Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian 2. Berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian 3. Kemandirian petani yang masih rendah 4. Berfluktuasinya harga pangan strategis 5. Meningkatnya produk pangan impor di pasar

Berdasarkan analisa SWOT diatas, maka isu strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
2. Penguatan Cadangan Pangan
3. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan.
4. Penanganan Kerawanan Pangan
5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
6. Peningkatan Keamanan Pangan Segar
7. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan.

C. Keadaan Pegawai

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 20 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan. Adapun rincian komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dimaksud sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	1	-	5	-	-	6
2	Ketersedian dan Kerawanan Pangan	-	-	1	-	4	-	-	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	1	-	2	2	-	5
4	Distribusi dan Harga	-	-	-	-	3	1	-	4

Pangan								
Jumlah (Orang)	-	-	3	-	14	3	-	20
Persentase (%)	-	-	15,00	-	70,00	15,00	-	100

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan adalah SLTA sebanyak 3 orang atau 15% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 20 orang dan tingkat pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang atau 15% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan berpendidikan (S1) yaitu sebanyak 14 orang atau mencapai 70% dari jumlah total pegawai.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	3	3	6
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	3	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	4	5
4	Distribusi dan Harga Pangan	2	2	4
Jumlah (Orang)		8	12	20
Persentase (%)		40	60	100

Berdasarkan Tabel 1.3, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (40%) dan pegawai yang

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 12 orang atau (60%).

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan (III) yaitu sebanyak 13 orang atau 61,9% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan golongan tertinggi golongan (IV) sebanyak 6 Orang atau 28,6% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	4	2	6
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	1	4	-	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	1	1	3	5
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	3	1	4
Jumlah (Orang)		•	2	12	6	20
Persentase (%)			10	60	30	100

d. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan
penjenjangan

No	Bidang	Pendidikan Penjenjangan (Orang)				Total (Orang)
		PIM-I	PIM-II	PIM-III	PIM-IV	
1	Sekretariat	-	1	1	-	2
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	-
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	-	-	-
Jumlah (Orang)		-	1	1	-	2

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas diperoleh informasi mengenai pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebanyak 2 orang, dengan rincian 1 orang telah mengikuti Diklat PIM-II, 1 orang telah mengikuti Diklat PIM-III.

Pegawai P3K Paruh Waktu dan Non ASN

Selain Pegawai yang berstatus ASN pada Dinas Ketahanan Pangan juga terdapat Pegawai P3K Paruh Waktu sebanyak 4 orang dan Tenaga Kerja Non ASN, secara lengkap komposisi Tenaga Non ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.6. Komposisi Pegawai Non ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

No.	Tugas	Jumlah
1	Pramusaji	2
2	Sopir	1

3	Penjaga Malam	1
4	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	2
	Jumlah	6 orang

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset/sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.7
Aset Tanah

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Zainab Bahmada (H. Yasin)	1,352.00	Kantor DKP

Tabel 1.8
Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Alat-alat Angkutan			
	Alat angkutan barang	2	0	2
	Alat angkutan sepeda motor	22	0	22
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	Mesin Ketik Manual Portable	0	1	1

	Filling Cabinet Besi	5	0	5
	Alat rumah tangga lain-lain	0	1	1
	Mesin Hitung Elektronik	0	8	8
	Laptop/Note Book	25	12	37
	Printer	18	0	18
	Modem	0	2	2
	Kipas Angin	7	4	11
	Dispenser	1	0	1
	Televisi	4	0	4
	AC Unit	9	0	9
	Mesin Absensi	2	0	2
	Mesin Potong Rumput	1	0	1
	Global Positioning System	1	0	1
	Lemari Es	1	0	1
	Stationary Generating Set	1	0	1
3	Alat Studio dan komunikasi			
	Sound System	0	1	1
	Camera Viden	3	0	3
	Layar Film/Projector	1	0	1
	Faximile	1	0	1
	Megaphone	2	0	2
	Loudspeaker	1	0	1
4	Meubeleur			
	Meja ½ Biro	40	1	41
	Lemari Kayu	6	0	6
	Kursi Putar	9	0	9
	Kursi Tamu	2	0	2
	Kursi Lipat	20	0	20
	Kursi Fiber Gas/Plastik	118	0	118
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2	0	2
	Jumlah	304	30	334
	Persentase	90,99	9,01	100

Tabel 1.9
Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Zainab Bahmada	408	Baik

Dalam menunjang kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan serta meningkatkan pelayanan publik pada Perangkat Daerah, maka Kondisi sarana dan prasarana pendukung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Kantor, yang terdiri dari :
 - a. Ruang Kerja Kepala Dinas tersedia Toilet, Meja dan Kursi Kerja, Kursi Tamu, Meja dan Kursi Rapat, AC, Lemari dan CCTV.
 - b. Ruang Kerja Sekretaris tersedia Meja dan Kursi Kerja 1 unit, Meja dan Kursi Tamu, Filling Cabinet 1 unit, Lemari 1 unit.
 - c. Ruang Kerja Sekretariat tersedia Meja dan Kursi 10 unit, Lemari 3 unit, Laptop 8 unit, Printer 4 unit, Dispenser, Kulkas, AC, dan sarpras pendukung lainnya.
 - d. Ruang Kerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan tersedia AC, Meja dan Kursi Kerja 5 set, Laptop 3 unit, printer 1 unit, dan sarpras pendukung lainnya.
 - e. Ruang Kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan tersedia Meja dan Kursi Kerja 4 set, Filling Cabinet, Laptop 3 unit, printer 1 unit, dan sarpras pendukung lainnya.
 - f. Ruang Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersedia Meja dan Kursi Kerja 5 set, Filling Cabinet, Laptop 3 unit, printer 1 unit, dan sarpras pendukung lainnya.
 - g. Ruang arsip, Toilet Laki-laki dan Toilet Perempuan.

E. Keuangan

Tabel 1.10
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	3,441,614,680
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,219,000
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,100,000
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,038,000
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,081,000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,591,533,080
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,512,433,080
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74,600,000
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,500,000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219,904,000
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,050,000
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,938,000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,706,000
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23,280,000
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154,930,000
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,648,000
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,648,000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,805,000
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,005,000
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	108,800,000

	Kantor	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57,342,000
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,222,000
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,120,000
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	205,600,800
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	95,765,400
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	37,415,000
2.09.03.2.01.0007	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen/Konsumen di Kab/Kota	41,938,000
2.09.03.2.01.0008	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	6,662,000
2.09.03.2.01.0009	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	9,750,400
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	26,126,600
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26,126,600
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	83,708,800
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	7,243,600
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	76,465,200
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	88,907,600
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9,743,600
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9,743,600
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	79,164,000

2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyediaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79,164,000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	31,655,200
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	31,655,200
2.09.05.2.01.0005	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	31,655,200

1.5 Sistematika LKj

Sistematika Penulisan LKj Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 mengacu pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan LKj
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj
- 1.4. Gambaran Umum PD
 - A. SOTK
 - B. Isu Strategis PD
 - C. Keadaan Pegawai
 - D. Keadaan Sarana dan Prasarana
 - E. Keuangan
- 1.5. Sistematika LKj

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - A. Visi dan Misi Kepala Daerah
 - B. Tujuan dan Sasaran PD
 - C. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2. Perjanjian Kinerja
- 2.3. Rencana Anggaran PD

- A. Target Belanja
- B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama PD
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Anggaran
- 3.4. Inovasi Perangkat Daerah
- 3.5. Aktualisasi dan Implementasi Core Value BerAKHLAK

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS"

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi

yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan *added value* (nilai tambah),
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju kedepan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan

lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas kedalam formula **"CINTA BS"**.

"CINTA BS" merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- C = Cerdas
- I = Integritas
- N = iNovatif
- T = Tauladan
- A = Agamis
- BS = Berdaya Saing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan

mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang ditetapkan Misi lima tahun kedepan yang menjadi pedoman dalam Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

- Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing;
- Misi II : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Misi III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS	1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Tujuan 1.1: Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
		Sasaran 1.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

VISI	Misi	Sasaran Daerah
	2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tujuan 2.1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 2.1.4: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
	3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing Sasaran 3.1.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah Sasaran 3.1.3: Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

VISI	Misi	Sasaran Daerah
	2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tujuan 2.1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Sasaran 2.1.4: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
	3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing
		Sasaran 3.1.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
		Sasaran 3.1.3: Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

VISI	Misi	Sasaran Daerah
	bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sumber : RPJMD 2021-2026

Dari ke-4 Misi Bupati tersebut, **Dinas Ketahanan Pangan termasuk dalam Misi III yaitu Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.** Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, melalui peningkatan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan selama 5 tahun. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan yaitu **"Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat"** dengan sasaran **"Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat"**, maka ditetapkanlah beberapa program yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, antara lain :

- 1) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- 3) Program penanganan kerawanan pangan; dan
- 4) Program pengawasan keamanan pangan

Pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai dengan indikator antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya skor PPH.
2. Meningkatnya pemanfaatan pekarangan masyarakat melalui pemberdayaan KWT.
3. Menumbuhkan lembaga yang berfungsi untuk menstabilkan harga pangan, khususnya beras.
4. Menurunnya jumlah desa rentan rawan pangan.
5. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan masyarakat
6. Meningkatnya lumbung pangan desa.
7. Meningkatnya peran Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten.

**Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran, serta Target Indikator Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020-2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun -					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	-	-	74,5	75	75,5	76
		Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85	86	86	87	93	92,79
			2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82	82,5	82,5	83,5	89	91,6

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

Tabel 2.3 Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Sain)			
MISI : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya sains			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Memacu ketersediaan pangan. 2. Penanganan daerah rawan pangan. 3. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
		Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 2. Meningkatkan peran kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi.

		Mewujudkan stabilitas harga pangan pokok	1. Peningkatan akses pangan masyarakat. 2. Mengusulkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat. 3. Pemantauan harga pangan pokok
--	--	--	--

2.2. PERJANJIAN KINERJA

2.2.1 Perjanjian Kinerja Eselon II

Tabel 2.4 . Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	92,79
		Skor PPH Konsumsi	91,60

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah:

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.115.451.080	
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 205.600.800	
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 88.907.600	
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 31.655.200	

Dari Perjanjian Kinerja Eselon II diatas terlihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat dengan 2 indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Skor PPH Ketersediaan, target 92,79
2. Skor PPH Konsumsi, target 91,60

2.2.2 Perjanjian Kinerja Eselon III

**Tabel 2.5 . Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	15,79%

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase angka kecukupan energy (AKE)	45%
2	Terawasinya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	89,65%

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Tahun 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di Tk. Produsen/Konsumen	100%

**Tabel 2.8 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya nilai AKIP	Nilai AKIP OPD	80
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%
3	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Indeks kepuasan ASN	82,5

2.2.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV

**Tabel 2.9 PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
3	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
4	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen
5	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan
6	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang kegiatan OPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit
7	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di OPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan
8	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan
9	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 unit
10	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya di OPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit
11	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit

2.3. RENCANA ANGGARAN PD

A. Target Belanja

Tabel 2.10. Rencana Anggaran Belanja Per Triwulan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rencana Anggaran Per Triwulan			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.115.451.080,00	2.633.452.220,00	52.017.000,00	415.551.860,00	14.430.000,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	60.219.000,00	8.000.000,00	21.393.000,00	20.826.000,00	0,00
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.100.000,00	0,00	14.162.000,00	12.938.000,00	0,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00	0,00	0,00
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.081.000,00	8.000.000,00	4.193.000,00	7.888.000,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.591.533.080,00	2.373.047.220,00	16.918.000,00	201.567.860,00	0,00
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.512.433.080,00	2.330.047.220,00	13.118.000,00	168.967.860,00	0,00
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.600.000,00	43.000.000,00	0,00	31.600.000,00	0,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.904.000,00	79.050.000,00	13.706.000,00	127.148.000,00	0,00
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.938.000,00	0,00	11.000.000,00	18.938.000,00	0,00
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.706.000,00	0,00	2.706.000,00	2.000.000,00	0,00
5. Penyediaan Bahan Baras dan Peraturan Perundang-undangan	23.280.000,00	9.000.000,00	0,00	14.280.000,00	0,00
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.930.000,00	64.000.000,00	0,00	90.930.000,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.648.000,00	45.218.000,00	0,00	0,00	14.430.000,00
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.648.000,00	45.218.000,00	0,00	0,00	14.430.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.805.000,00	90.405.000,00	0,00	46.400.000,00	0,00
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.005.000,00	28.005.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	108.800.000,00	62.400.000,00	0,00	46.400.000,00	0,00

Kantor					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.342.000,00	37.732.000,00	0,00	19.610.000,00	0,00
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.222.000,00	29.612.000,00	0,00	19.610.000,00	0,00
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	205.600.800,00	81.840.000,00	56.600.600,00	67.160.200,00	0,00
Kegiatan Penyediaan dan Penyajuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	95.765.400,00	19.903.000,00	28.003.400,00	47.859.000,00	0,00
1. Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	37.415.000,00	15.158.000,00	6.726.000,00	15.531.000,00	0,00
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen Konsumen di Kab/Kota	41.938.000,00	4.595.000,00	10.785.000,00	26.558.000,00	0,00
3. Pengembangan Ketenagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	6.662.000,00	150.000,00	4.450.000,00	2.062.000,00	0,00
4. Penyusunan Rencana Bahan Makanan	9.750.400,00	0,00	6.042.400,00	3.708.000,00	0,00
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	26.126.500,00	6.262.000,00	12.472.600,00	7.392.000,00	0,00
1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26.126.500,00	6.262.000,00	12.472.600,00	7.392.000,00	0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	83.708.800,00	55.675.000,00	16.124.600,00	11.909.200,00	0,00
1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	7.243.600,00	0,00	5.235.600,00	2.008.000,00	0,00
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamplangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	76.465.200,00	55.675.000,00	10.889.000,00	4.901.200,00	0,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	88.907.600,00	45.600.000,00	16.545.000,00	26.762.600,00	0,00
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.743.600,00	0,00	6.780.000,00	2.963.600,00	0,00
1) Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.743.600,00	0,00	6.780.000,00	2.963.600,00	0,00
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	79.164.000,00	45.600.000,00	9.765.000,00	23.799.000,00	0,00

Kabupaten/Kota					
1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyusunan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.164.000,00	45.600.000,00	9.765.000,00	23.799.000,00	0,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	31.655.200,00	15.500.000,00	5.889.000,00	10.266.200,00	0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	31.655.200,00	15.500.000,00	5.889.000,00	10.266.200,00	0,00
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	31.655.200,00	15.500.000,00	5.889.000,00	10.266.200,00	0,00
TOTAL	3.441.614.680,00	2.776.992.220,00	131.051.600,00	519.740.860,00	14.430.000,00

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada triwulan I rencana anggaran belanja sebesar Rp. 2.633.452.220,00 atau 84,53%, pada triwulan II rencana anggaran belanja sebesar Rp. 52.017.000,00 atau 1,67%, pada triwulan III rencana anggaran belanja sebesar Rp. 415.551.860,00 atau 13,34%, sedangkan di triwulan IV rencana anggaran belanja sebesar Rp. 14.430.000,00 atau 0,46%.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, pada triwulan I rencana anggaran belanja sebesar Rp. 81.840.000,00 atau 39,81%, pada triwulan II rencana anggaran belanja sebesar Rp. 56.600.600,00 atau 27,53%, pada triwulan III rencana anggaran belanja sebesar Rp. 67.160.200,00 atau 32,67%, sedangkan di triwulan IV rencana anggaran belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, pada triwulan I rencana anggaran belanja sebesar Rp. 45.600.000,00 atau 51,29%, pada triwulan II rencana anggaran belanja sebesar Rp. 16.545.000,00 atau 18,61%, pada triwulan III rencana

anggaran belanja sebesar Rp. 26.762.600,00 atau 30,10%, sedangkan di triwulan IV rencana anggaran belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan, pada triwulan I rencana anggaran belanja sebesar Rp. 15.500.000,00 atau 48,96%, pada triwulan II rencana anggaran belanja sebesar Rp. 5.889.000,00 atau 18,60%, pada triwulan III rencana anggaran belanja sebesar Rp. 10.266.200,00 atau 32,43%, sedangkan di triwulan IV rencana anggaran belanja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

**Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/konsumen	205.600.800
		Skor PPH Konsumsi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	
			Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	88.907.600
			Terawasinya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	31.655.200
			Meningkatnya nilai AKIP OPD	Nilai AKIP OPD	3.115.451.080

Alokasi anggaran per sasaran Strategis adalah untuk pencapaian tujuan organisasi yaitu :

1. Sasaran 1, yaitu : Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat, dengan rincian sbb :
 - Terwujudnya stabilitas harga pangan dan Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam : 5,97%
 - Tertanganinya kerawanan pangan daerah : 2,58%
 - Terawasinya keamanan pangan : 0,92%
 - Meningkatnya nilai AKIP OPD : 90,52%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja pemerintah merupakan bentuk realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah

No	Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD

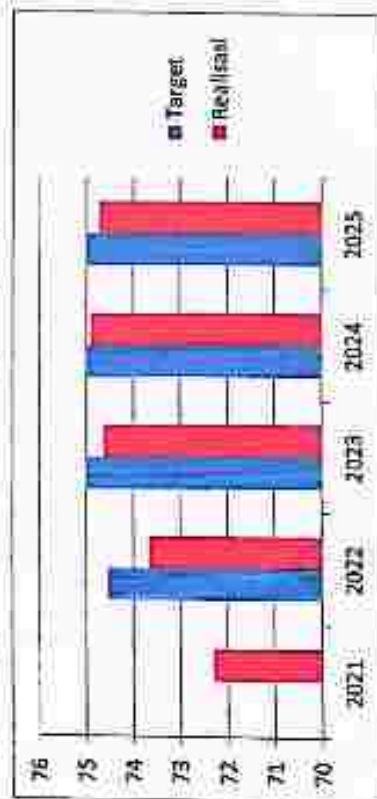
Berdasarkan Visi Misi Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan termasuk dalam Misi III yaitu **"Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing"**. Dari misi tersebut Dinas Ketahanan Pangan bertujuan **Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan indikator tujuan **Indeks Ketahanan pangan (IKP)**. Capaian indikator tujuan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL 3.2. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025	
								Target	Realisasi
1	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	-	72,30	73,67	74,63	74,91	75	74,73
									99,64

Sumber data : Dinas Ketahanan pangan Kab. B/S

Grafik 3.1 Capaian Indikator Tujuan (IKP) Tahun 2021-2025



Dari Tabel dan Grafik diatas, terlihat bahwa target Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar 75, dengan capaian sebesar 74,73 atau 99,64%. Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 yaitu sebesar 74,91. Dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan menurun sebesar 0,18 point atau 0,24% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan produksi pangan, tingginya angka stunting, terbatasnya akses air bersih, dan juga belum meratanya distribusi tenaga kesehatan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Eselon II Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Analisis pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II TAHUN 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perteleasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Target	Realisasi
1. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat	1. Nilai Skor PPH Ketersediaan 2. Nilai Skor PPH Konsumsi	$\% AKE \times \text{dimana } \% AKE = \frac{\text{Energi Ketersediaan Pangan}}{AKE \text{ Ketersediaan}}$ $\text{bobot} = \text{bobot masing masing golongan pangan}$ $\% AKE \times \text{dimana } \% AKE = \frac{\text{Energi Konsumsi Pangan}}{AKE \text{ Konsumsi}}$ $\text{bobot} = \text{bobot masing masing golongan pangan}$	Neraca Bahan Makanan Susenas BPS	92,79 91,60	93 92,31

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. B/B

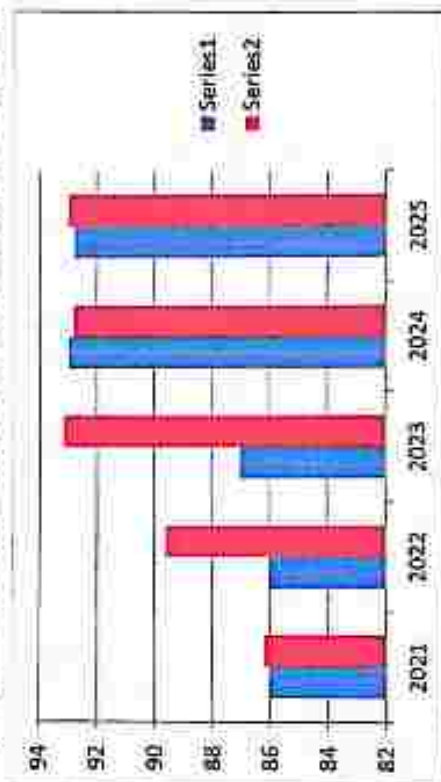
3.1.1 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025

Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025		Capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
							Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya ketersediaan dan ketersediaan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH dan Ketersediaan	86,19	89,61	93,16	92,79	92,79	93,00	100	90,00	100
		Skor PPH Konsumsi	83,40	82,50	89,20	91,60	91,60	92,31	100	86,50	100

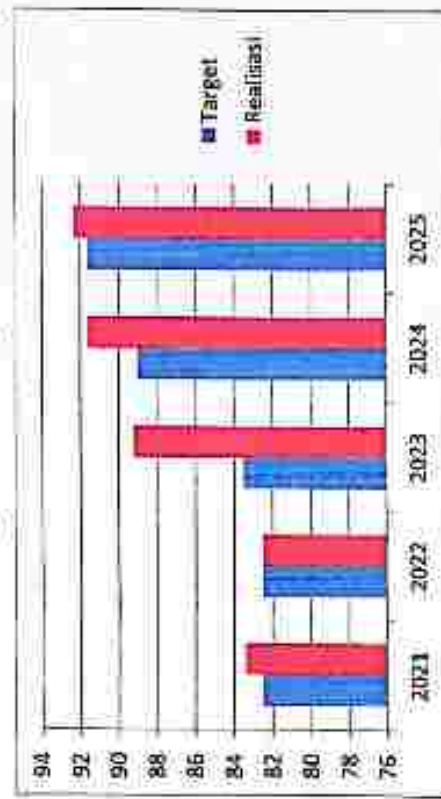
Sumber data : Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan.

Grafik 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II (Skor PPH Ketersediaan) Tahun 2021-2025



Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa target Skor PPH Ketersediaan Tahun 2025 adalah 92,79, dengan realisasi sebesar 93 atau 100%. Sedangkan realisasi skor PPH Ketersediaan Tahun 2024 sebesar 92,79. Terlihat bahwa realisasi skor PPH Ketersediaan Tahun 2025 naik 0,21 point atau 0,23% dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.3 Capaian Indikator Kinerja Eselon II (Skor PPH Konsumsi) Tahun 2021-2025



Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa target Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 adalah 91,6, dengan realisasi sebesar 92,31 atau 100%. Sedangkan realisasi skor PPH Konsumsi Tahun 2024 sebesar 91,60. Terlihat bahwa realisasi skor PPH Konsumsi Tahun 2025 naik 0,71 point atau 0,78% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan semakin beragamnya tingkat konsumsi, sehingga skor PPH Konsumsi naik dari tahun sebelumnya.

3.1.1 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

Tabel 3.5. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025	
				Target	Realisasi
1	Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	15,79%	15,79%	0%
1.1	Tersusunnya Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	100 %	100%
1.2	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	100 %	100%

Tabel 3.6 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase angka kecukupan energy (AKE)	47,84%	45%	44,15%
1.1	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/hari sesuai AKG	Jumlah konsumsi pangan perkapita/ hari	271,9 gr/kap/hr	271,9 gr/kap/hr	254,03 gr/kap/hr
2	Terwujudnya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	89,65%	89,65%	96,55%

2.1	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	100%	100%
-----	--	--	------	------	------

Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di Tk. Produsen/Konsumen	100%	100%	100%
1.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Persentase pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	80%	80%	80%
1.2	Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan daerah	Persentase cadangan pangan daerah	100%	100 %	96,21%

Tabel 3.8 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025
SEKRETARIS

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya nilai AKIP	Nilai AKIP OPD	45,45	80	51,15
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	100%	100%
	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawalan	Indeks kepuasan ASN	80	82,5	82,5
1.1	Meningkatnya komponen pemenuhan dokumen SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PD	100%	100%	100%
1.2	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan PD	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	100%	100%
1.3	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi kepegawalan PD	Indeks kepuasan pelayanan kepegawalan ASN	80	82,5	82,5
1.4	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum PD	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	80	82,5	82,5
1.5	Meningkatnya penyediaan barang milik PD	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	100%	100%
1.6	Meningkatnya jasa penunjang urusan PD	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
1.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase barang milik daerah pada OPD yang dipelihara	40%	40%	40%

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	93,00	100	93
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92,31	100	92,31

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	-	92,79	93,00	100%
Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	91,60	92,31	100%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	92,79	93,00	100	Berhasil	-
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,60	92,31	100	Berhasil	-

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

- ✓ Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sudah 100%. Hal ini tidak terlepas dari program kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan

Pangan. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan yang menunjang keberhasilan/pencapaian atas sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

- 1) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah. Pada Tahun 2025, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melakukan monitoring terhadap kegiatan penanganan kerawanan pangan Tahun 2024 yaitu pengadaan bibit nangka mini sebanyak 600 batang di 3 desa antara lain :

1. Desa Pinc Baru Kecamatan Air Nipis
2. Desa Sukarami Kec. Air Nipis
3. Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kecamatan

Bibit nangka mini tersebut rata-rata 80% sudah tumbuh dengan subur dan sudah ada yang berbuah. Respon masyarakat pun sangat antusias dan baik terhadap pembagian bibit dan berharap agar pembagian bibit nangka tersebut dapat dibagikan secara merata ke masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mendorong majunya suatu daerah yang rawan/rentan rawan pangan menjadi daerah mandiri pangan, antara lain :

- 1) Adanya kemauan dari masyarakat untuk maju dan berkembang.
- 2) Peran serta Kepala Desa yang sangat mendukung dan mensupport apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
- 3) SDM masyarakat setempat yang memiliki ketekunan, usaha, keyakinan, ulet dan lincah dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga menjadi produktif dan dapat mengatasi kerentanan pangan dan gizi dalam rumah tangga.

Berikut dokumentasi kegiatan monitoring penanganan kerawanan pangan tersebut :

Gambar 3.1
Monitoring Penyaluran Bibit Nangka Mini



Sumber: Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

- 2) Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
Sub kegiatan ini mempunyai keluaran jumlah dokumen informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan target 1 dokumen. Dokumen tersebut adalah dokumen Neraca Bahan Makanan, dimana dalam dokumen tersebut dapat mengukur skor PPH Ketersediaan. Total ketersediaan energi per kapita perhari berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2025 adalah 3.417 kkal/kap/hr, ketersediaan protein 120,40 gram/kap/hr, dengan tingkat ketersediaan energi tahun 2025 adalah 142,37% dan tingkat ketersediaan protein 191,11%. Ketersediaan energi dan protein wilayah Kabupaten

Bengkulu Selatan pada tahun 2025 ini sudah mencukupi anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein 63 gram/kap/hr berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012.

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025 dengan data Tahun 2024, Pola Keragaman Pangan atau yang disebut Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat ketersediaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan 2025

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2,340	97.5	0.5	48.75	25.00	25.0	
2.	Umbi-umbian	124	5.2	0.5	2.59	2.50	2.5	
3.	Pangan Hewani	351	14.6	2.0	29.22	24.00	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	162	6.7	0.5	3.37	3.37	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	93	3.9	0.5	1.93	1.00	1.0	
6.	Kacang-kacangan	109	4.5	2.0	9.09	9.09	10.0	
7.	Gula	115	4.8	0.5	2.40	2.40	2.5	
8.	Sayuran dan buah	123	5.1	5.0	25.63	25.63	30.0	
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	3,417	142.4		122.98	93.00	100.0	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2025

Skor PPH tingkat ketersediaan Bengkulu Selatan Tahun 2025 sebesar 93,00, skor PPH yang diharapkan adalah 100 yang artinya ketersediaan pangan sudah beragam sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi kebutuhan.

Ketersediaan kelompok pangan hewani, minyak/lemak, dan sayuran dan buah sudah cukup baik. Namun ketersediaan untuk kelompok padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan lain-lain masih kurang karena ketersediaannya masih dibawa skor PPH yang dianjurkan. Perlu upaya untuk meningkatkan ketersediaan kelompok pangan tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat dengan mudah diakses untuk dikonsumsi. Dengan seimbangnya ketersediaan pangan tersebut diharapkan dapat memenuhi konsumsi pangan yang beragam dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang di Bengkulu Selatan.

- 3) Kegiatan Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang mempunyai keluaran Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan.

Berdasarkan peta FSVA Tahun 2025, didapatkan 1 desa yang termasuk dalam prioritas I yaitu Ds. Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna, 6 desa yang termasuk pada prioritas II (Ds. Batu Ampar Kec. Kedurang, Ds. Cinto Mandi Kec. Pino Raya, Ds. Kembang Seri Kec. Pino Raya, Ds. Padang Mumpo Kec. Pino, Ds. Batu Panco Kec. Ulu Manna dan Ds. Air Tenam Kec. Ulu Manna), dan 17 desa prioritas III, 82 desa prioritas IV, 44 desa prioritas V, dan 8 desa/kelurahan yang masuk dalam prioritas VI. Dari peta FSVA tersebut didapatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sebesar **74,73**.

Peta FSVA Tahun 2025 terlampir.

- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan keluaran jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan melakukan pembagian bibit tanaman sayuran, kompos, pupuk NPK, dan polybag yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Desember Tahun 2025. Bibit dan sapras tersebut disalurkan di 6 desa yang termasuk dalam lokus stunting. 6 (enam) desa tersebut antara lain : 1. KWT Cempaka Putih Desa Darat Sawah Kec. Seginim, 2. KWT Usaha Baru Desa Sukarami Kec. Air Nipis, 3. KWT Teratai Putih Desa Sukamaju Kec. Air Nipis, 4. KWT Harapan Maju Desa Tanjung Beringin Kec. Air Nipis. 5. KWT Mekar Jaya Desa Talang Padang Kcc. Pino Raya, 6. KWT Melati Desa Padang Serasan Kec. Pino Raya. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan juga mempunyai demplot pekarangan halaman kantor sebagai percontohan bagi karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Demplot pekarangan halaman kantor juga dilaksanakan sebagai percontohan bagi karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Berikut dokumentasi kegiatan P2KP dan Sosialisasi yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi CPCL P2KP



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Gambar 3.3
Pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Bibit dan Sarana Lainnya



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Gambar 3.4
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring P2KP



Sumber: Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

- 5) Kegiatan Penyusunan target konsumsi pangan per kapita per tahun bisa diketahui melalui pengukuran pola pangan harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan

konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Tujuan penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa (FAO-RAPA, 1989).

Dalam penentuan PPH, bahan pangan dikelompokkan menjadi Sembilan :

- 1) Padi-padian (beras, jagung, terigu, dan hasil olahannya)
- 2) Umbi-umbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan hasil olahannya)
- 3) Pangan hewani (ikan, daging, telur, susu dan hasil olahannya)
- 4) Minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit dan margarin)
- 5) Buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, mete dan cokelat)
- 6) Kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya)
- 7) Gula (gula pasir, gula merah dan sirup)
- 8) Sayuran dan buah (semua jenis sayuran dan buah-buahan)
- 9) Lain-lain

Tabel 3.12
Situasi Konsumsi Pangan berdasarkan Data Analisa Konsumsi
Tingkat Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

KELOMPOK PANGAN	Berat (gram/kap/hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	SKOR MAKS	SKOR PPH
	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
Padi-padian	288.14	1112.78	24.95	25.00	25.00
Umbi-umbian	33.95	44.80	.51	2.50	1.07
Pangan Hewani	134.94	263.84	26.30	24.00	24.00
Minyak dan Lemak	23.35	210.52	.00	5.00	5.00
Buah/Biji Berminyak	24.48	130.78	1.24	1.00	1.00
Kacang-kacangan	17.55	54.00	4.05	10.00	5.14
Gula	13.50	46.20	.30	2.50	1.10
Sayur dan Buah	261.40	144.39	4.95	30.00	30.00
Lain-lain	57.47	38.10	1.48	0.00	0.00
Jumlah	854.78	2045.40	63.77	100.00	92.31

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2025.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa secara umum total konsumsi energy actual sebesar 2045.40 kkal/kap/hari lebih rendah total kebutuhan energy ideal di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 2.100 kkal/kap/hari. Dari hasil analisis konsumsi tingkat rumah tangga terlihat bahwa skor PPH Konsumsi aktual di Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar **92,31**.

- 6) Pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dimana keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

dan organik, baik ditingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Pengadaan rapid test kit untuk deteksi cepat residu pestisida dan atau mikroba.
- (2) Pengujian keamanan pangan segar.
- (3) Melakukan pemantauan, pengawasan keamanan pangan segar.

Hasil pengawasan pangan segar dapat dilihat dari table dibawah ini :

Pada Tanggal 03 Maret 2025:

- ✓ Pasar Kutau (Apel, Anggur Hijau, Apel Hijau, Anggur Hitam, Apel Wasintan, Qurma). Total sampel yang diuji adalah sebanyak 06 (enam) sampel pangan segar.

NOMOR SAMPEL	JENIS SAMPEL	ASAL SAMPEL	KANDUNGAN YANG DI UJI	HASIL PENGUJIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
001	Apel	Seginim	Pestisida	Negatif (-)	Aman
002	Anggur Hijau	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman
003	Apel Hijau	Pagar Alam	Pestisida	Negatif (-)	Aman
004	Anggur Hitam	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman
005	Apel Wasintan	Seginim	Pestisida	Negatif (-)	Aman
006	Qurma	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari ke-6 sample diatas, terlihat bahwa semua sample aman dikonsumsi.

Pada Tanggal 23 Oktober 2025:

- ✓ Pasar Nanjungan Kecamatan Pino Raya, (Tomat, Buncis, Kubis, Bawang Daun, Timun, Cabe Merah, Cabe Rawit Setan, Pir, Jeruk, Anggur Hijau, dan Anggur Merah).
- ✓ Total sampel yang diuji adalah sebanyak 11 (sebelas) sampel pangan segar.

NOMOR SAMPEL	JENIS SAMPEL	ASAL SAMPEL	KANDUNGAN YANG DI UJI	HASIL PENGUJIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
001	Tomat	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
002	Buncis	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
003	Kubis	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
004	Bawang Daun	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
005	Timun	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
006	Cabe merah	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
007	Cabe Rawit Setan	Indra laya Prabumuli	Organopospat	Negatif (-)	Aman
008	Fir	Cina	Formalin	Negatif (-)	Aman
009	Jeruk	Seginim	Formalin	Negatif (-)	Aman
010	Anggur Hijau	Amerika	Formalin	Negatif (-)	Aman
011	Anggur Merah	Cina	Formalin	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari 11 sample diatas terlihat semua sample aman dikonsumsi.

Pada Tanggal 18 November 2025:

- ✓ Pasar Babatan Kecamatan seginim (Cabe Rawit, Cabe Keriting, Timun, Terong, Bawang Daun, dan Tomat).
- ✓ Total sampel yang diuji adalah sebanyak 6 (enam) sampel pangan segar.

NOMOR SAMPEL	JENIS SAMPEL	ASAL SAMPEL	KANDUNGAN YANG DI UJI	HASIL PENGUJIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
001	Cabe Rawit	Seginim	Organopospat	Positif (+)	Tidak Aman
002	Cabe Keriting	Seginim	Organopospat	Negatif (-)	Aman
003	Timun	Seginim	Organopospat	Negatif (-)	Aman

004	Terong	Seginim	Organopospat	Negatif (-)	Aman
005	Bawang Daun	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
006	Tomat	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari ke- 6 sample diatas, terlihat bahwa cabe seginim tidak aman karena positif mengandung organopospat.

Pada Tanggal 17 Desember 2025 :

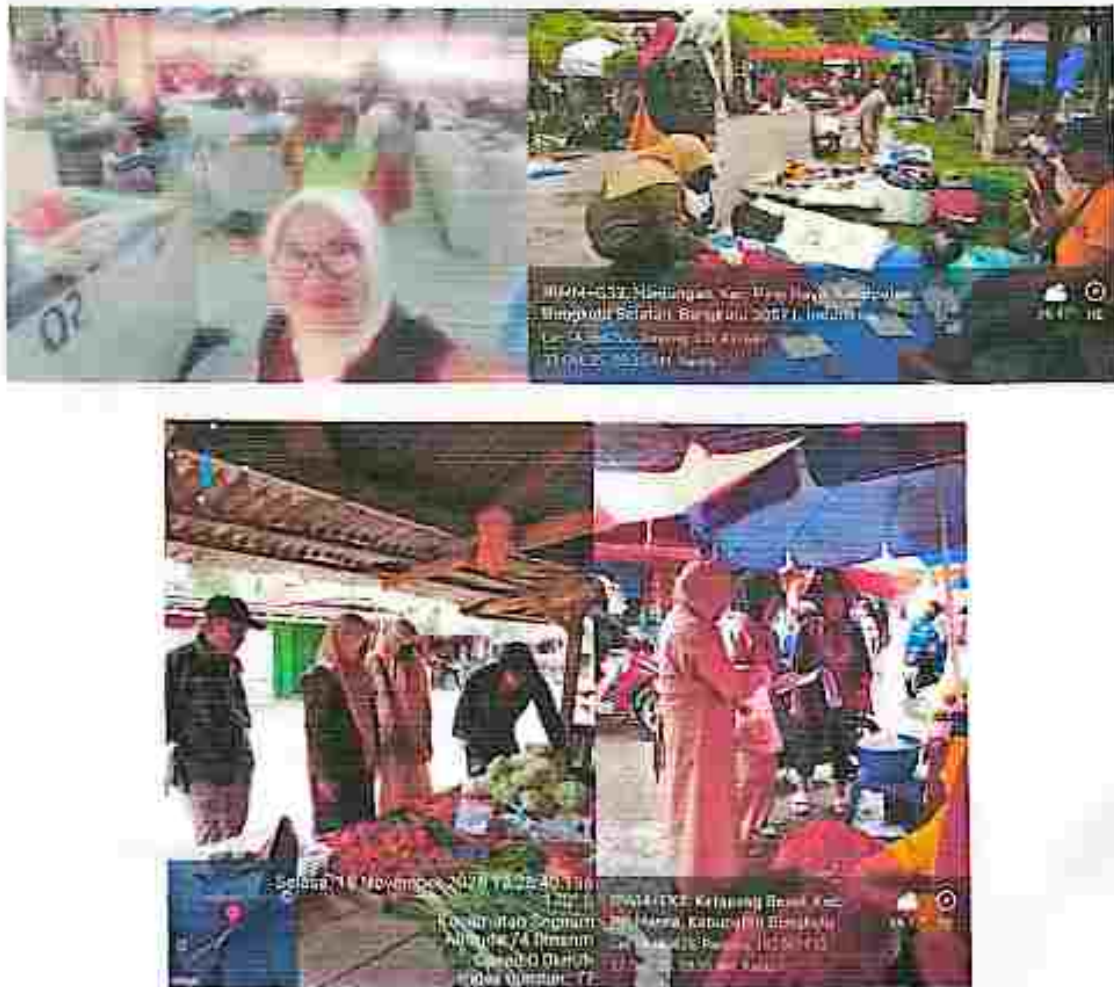
- ✓ Pasar Ampera Kecamatan Manna (Tomat, Buncis, Kubis, Bawang Daun, Timun, cabe merah, Cabe Rawit Setan, Fir, Jeruk, Anggur Hijau, dan Anggur Merah)
- ✓ Total sampel yang diuji adalah sebanyak 6 (enam) sampel pangan segar.

NOMOR SAMPEL	JENIS SAMPEL	ASAL SAMPEL	KANDUNGAN YANG DI UJI	HASIL PENGUJIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
001	Cabe Merah	Kedurang	Organopospat	Negatif (-)	Aman
002	Cabe Rawit Setan	Pagar alam	Organopospat	Negatif (-)	Aman
003	Oyong	Seginim	Organopospat	Negatif (-)	Aman
004	Timun	Seginim	Organopospat	Negatif (-)	Aman
005	Tomat	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman
006	Cabe Rawit Setan	Curup	Organopospat	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari ke 6 sample diatas, terlihat bahwa semua sample aman dikonsumsi.

Gambar 3.5
Pengambilan sampel di Pasar



Sumber: Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Gambar 3.6
Pengujian sampel





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 2 kecamatan, yaitu di Kec. Pino Raya dan Kecamatan Air Nipis. Berikut Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Tingkat Kecamatan.

Gambar 3.7
Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Tk. Kecamatan



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

7. Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Perkembangan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditanda tangani tanggal 8 Agustus 2017. Jumlah Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak **26.793,58 Kg**. Pada Tahun 2025 dilakukan penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah pada bulan November 2025 sebanyak **2.448 Kg** yang pemanfaatannya untuk warga terdampak bencana banjir di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 526.407 Tahun 2025 tanggal 27 Oktober 2025 yaitu Kecamatan Kota Manna, Kecamatan Manna, Kecamatan Pino, Kecamatan Seginim, Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Kedurang Ilir dan Kecamatan Kedurang. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dititipkan di Perum Bulog. Untuk Bantuan Pangan (BAPANG) Pemerintah Pusat dilaksanakan 4 (empat) bulan dengan 2 (dua) kali periode penyaluran, yaitu Periode I untuk Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 berupa beras sebanyak 336.520 kg dan Periode II untuk Bulan Oktober dan November Tahun 2025 berupa beras sebanyak 328.840 kg dan minyak goreng sebanyak 65.768 liter.

Berikut gambar-gambar penyaluran cadangan pangan pemerintah di beberapa kecamatan :

Gambar 3.8
Penyaluran Bantuan CPPD Tahun 2025



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Gambar 3.9
Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Pusat Tahun 2025





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

- 8) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota. Sub kegiatan ini mempunyai keluaran Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan dengan target 4 unit. Kegiatan di seksi distribusi pangan meliputi : Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan, pemasaran, pengolahan dan pengemasan pangan.

Gapoktan yang diberdayakan antara lain : Gapoktan Empat Serangkai Desa Melao Kec. Manna, Gapoktan Tiga Serangkai Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang, Gapoktan Simpati Desa Maras Kec. Air Nipis, dan Gapoktan Sejahtera Desa Beringin Datar Kec. Pino.

Tabel 3.13

Data Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota

No	Jenis kegiatan	LDPM Empat Serangkai	LDPM Tiga Serangkai	LDPM Simpati	LDPM Sejahtera
1.	Pembelian - Gabah (Ton) - Beras (Ton)	250 250	280 150	- 250	
2.	Penjualan - Gabah (Ton) - Beras (Ton)	275 277	230 297	- 250	
3.	Stok - Gabah (Ton) - Beras (Ton)	5 3	10 3	- 5,572	

4.	Penggilingan (Ton)	275	220	500	1,28
5.	Harga - Gabah (Rp) - Beras (Rp)	6.000 12.000	6.000 12.000	6.000 12.000	
6.	Pemasaran	Manna Seluma Bengkulu	Manna Bengkulu Bintuhan Lampung	Manna Bengkulu Lampung	

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2025

Gambar 3.10
Pembinaan LDPM



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

- 9) Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini mempunyai keluaran Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di

Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

a) Pengamatan Harga Pangan Pokok Harian

Kegiatan Pemantauan Harga Pangan Pokok Harian dilakukan pada Pasar Harian dan Pasar Mingguan di wilayah Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk pasar harian dilakukan setiap hari, sedangkan untuk pasar Mingguan yang ada di beberapa kecamatan dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu jadi dalam satu bulan pengamatan dilakukan sebanyak 8 kali, untuk 1 (satu) tahun sebanyak 96 kali pengamatan. jadi total pengamatan yang dilaksanakan di kecamatan dalam wilayah kab. Bengkulu Selatan sebanyak 456 kali pengamatan/tahun. Hasil pengamatan langsung dikirim ke Website Badan Pangan Nasional. Sedangkan untuk informasi harga pangan pokok di kabupaten Bengkulu Selatan diinformasikan melalui radio, iklan/ surat kabar dan media sosial setiap hari (dapat dilihat pada Laporan Panel Harga Pangan Tahun 2025).

Komoditas pemantauan harga pangan tersebut antara lain : Beras premium, Beras medium (kg), Kedelai biji kering (impor) (kg), Bawang merah (kg), Bawang putih bonggol (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit merah (kg), Daging ayam ras (kg), Daging sapi murni (kg), Telur ayam ras (kg), Gula konsumsi (kg), Minyak goreng kemasan (kg), Tepung terigu (curah) (kg),

Ikan tongkol (kg), Garam halus beryodium (kg), Tepung terigu kemasan (kg).

Berikut dokumentasi pemantauan harga pangan antara lain :

Gambar 3.11
Kegiatan pemantauan harga pangan pokok



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

b) Operasi Pasar dan Monitoring Harga Pangan untuk waktu tertentu.

Operasi pasar dilakukan melalui monitoring harga pangan pokok di pasar harian dan pasar mingguan serta melaksanakan Gerakan Pasar Murah EraGro menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Disamping itu Gerakan Pasar Murah ini juga dilakukan atas dasar permintaan dari Desa, Kelurahan dan Kecamatan, serta kerjasama melalui Bank Indonesia, Bank Bengkulu, dan Instansi Vertikal seperti POLRES BS, KODIM 0408 BS, KAJARI BS

dan Pengadilan Negeri BS. Sepanjang Tahun 2025 Gerakan Pangan Murah Eragro ini sudah dilaksanakan sebanyak 110 kali menyebar di wilayah kabupaten Bengkulu selatan. Berikut dokumentasi operasi pasar antara lain :

Gambar 3.12
Kegiatan Operasi Pasar melalui monitoring harga pangan pokok



Sumber: Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Gambar 3.13
Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)



Sumber: Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada pencapaian kinerja (Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025) pada table berikut :

Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100	90,94	9,06
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	90,94	9,06

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusunan LKj Dinas Ketahanan Pangan

Keterangan :

- Capaian Kinerja : $\text{Realisasi Indikator} / \text{Target Indikator} \times 100\%$
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung indikator
- Tingkat Efisiensi : $\text{Capaian Kinerja} - \text{Penyerapan Anggaran}$

Dari tabel pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 terlihat bahwa tingkat efisien penyerapan anggaran atas capaian kinerja sudah **efisien** dengan pencapaian atas sasaran strategis sebesar **100%**.

Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran 2024			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	92,79	93,00	100	3.441.614.680	3.129.286.559	90,93	Efisien
		91,60	92,31	100				

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	80	51,15	63,94	3.115.451.080	2.874.459.739	92,28	Effisien
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100	50.219.000	50.097.534	99,76	Effisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	27.100.000	27.017.063	99,69	Effisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100	3.038.000	3.018.713	99,37	Effisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	20.081.000	20.061.758	99,90	Effisien

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	2.591.533.080	2.374.527.122	91,63	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	100	2.512.433.080	2.295.481.946	91,36	Efisien
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100	74.600.000	74.600.000	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	4.500.000	4.445.176	98,78	Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82,5	82,5	100	19.904.000	210.819.791	96,04	Efisien
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100	4.000.000	3.935.000	98,38	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100	3.050.000	3.024.000	99,15	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100	29.938.000	29.553.056	98,71	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100	4.706.000	2.647.720	56,26	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	100	23.280.000	16.830.000	72,29	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100	154.930.000	154.830.015	99,94	Efisien

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	59.648.000	56.443.500	94,63	Efisien
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	7 unit	100	59.648.000	56.443.500	94,63	Efisien
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	136.805.000	126.857.292	92,73	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100	28.005.000	18.057.292	64,48	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100	108.800.000	108.800.000	100	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40%	40%	100	57.342.000	55.714.500	97,16	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30 unit	25 unit	83,33	49.222.000	47.654.500	96,82	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	100	8.120.000	8.060.000	99,26	Efisien
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100% 45%	100% 44,15%	100 100	205.600.800	199.310.562	96,94	Efisien

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	80%	80%	100	95.765.400	94.745.137	98,93	Efisien
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	100	37.415.000	36.997.580	98,88	Efisien
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen Konsumen di Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	100	41.938.000	41.743.972	99,54	Efisien
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	4 unit	4 unit	100	6.662.000	6.622.317	99,40	Efisien
Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	1 dokumen	100	9.750.400	9.381.258	96,21	Efisien
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	100%	100%	100	26.126.600	24.072.172	92,14	Efisien
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27,85 ton	26,79358 ton	96,21	26.126.600	24.072.172	92,14	Efisien

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	271,9 gr/kap/hr	254,03 gr/kap/hr	100	83.708.800	80.493.253	96,16	Efisien
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.243.600	7.185.542	99,20	Efisien
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	100	76.465.200	73.307.711	95,87	Efisien
Program Penanganan Kerawanan Pangan	15,79%	0%	0	88.907.600	24.189.542	27,21	Tidak Efisien
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100%	100%	100	9.743.600	9.656.442	99,11	Efisien
Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100	9.743.600	9.656.442	99,11	Efisien
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	0%	0	79.164.000	14.533.100	18,36	Tidak Efisien

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	79.164.000	14.533.100	18,36	Efisien
Program Pengawasan Keamanan Pangan	89,65%	96,55%	100%	31.655.200	31.326.716	98,96	Efisien
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	100%	100%	100	31.655.200	31.326.716	98,96	Efisien
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	31.655.200	31.326.716	98,96	Efisien

Sumber : Laporan SIPDA Triwulan IV Tahun 2025.

Keterangan :

- Capaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target Indikator x 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung indikator
- Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja - Penyerapan Anggaran

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa pada Program Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota **Tidak Efisien**, hal ini dikarenakan anggaran pada program/kegiatan tersebut sudah ada realisasi belanjanya sebesar Rp. 14.533.100,00 atau 18,36% untuk monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan kerawanan pangan Tahun 2024 dan koordinasi kegiatan penanganan kerawanan pangan tersebut.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16 Realisasi Angguran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Data Kegiatan		
	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.115.451.080,-	2.874.459.739,-	92,28
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	50.219.000,-	50.097.200,-	99,76
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.100.000,-	27.017.063,-	99,69
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.038.000,-	3.018.713,-	99,37
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.081.000,-	20.061.758,-	99,90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.591.533.080,-	2.374.527.122,-	91,63
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.512.471.080,-	2.295.481.946,-	91,36
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.600.000,-	74.600.000,-	100
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,-	4.445.176,-	98,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.904.000,-	210.819.791,-	96,04
1. Penyediaan kumpunan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,-	3.935.000,-	98,38
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.050.000,-	3.024.000,-	99,15
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.938.000,-	29.553.056,-	98,71
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.706.000,-	2.647.720,-	56,26
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.280.000,-	16.830.000,-	72,29
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.930.000,-	154.830.015,-	99,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.648.000,-	56.443.500,-	94,63
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.648.000,-	56.443.500,-	94,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.805.000,-	126.857.292,-	92,73
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.005.000,-	18.057.292,-	64,48
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.800.000,-	108.800.000,-	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.342.000,-	55.714.500,-	97,16
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.222.000,-	47.654.500,-	96,82
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,-	8.060.000,-	99,26
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	205.600.800,-	199.310.562,-	96,94

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Pangan Lainnya	95.765.400,-	94.745.137,-	98,93
1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	37.415.000,-	36.997.580,-	98,88
2. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produser Konsumen di Kab/Kota	41.938.000,-	41.743.972,-	99,54
3. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	6.662.000,-	6.622.317,-	99,40
4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan	9.750.400,-	9.381.268,-	96,21
Kegiatan Pengelolaan dan Reselidangan Cadangan Pangan Kab/Kota	26.126.600,-	24.072.172,-	92,14
1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26.126.600,-	24.072.172,-	92,14
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	83.708.800,-	80.493.253,-	96,16
1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	7.243.600,-	7.185.542,-	99,20
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatanragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	76.465.200,-	73.307.711,-	95,87
Program Penanganan Kerawanan Pangan	88.907.600,-	24.189.542,-	27,21
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.743.600,-	9.656.442,-	99,11
1) Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.743.600,-	9.656.442,-	99,11
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota	79.164.000,-	14.533.100,-	18,36
1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.164.000,-	14.533.100,-	18,36
Program Pengawasan Keamanan Pangan	31.655.200,-	31.326.716,-	98,96
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	31.655.200,-	31.326.716,-	98,96
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	31.655.200,-	31.326.716,-	98,96
JUMLAH	3.441.614.680,-	3.129.286.559,-	90,94

Sesuai APBD-P tahun anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 3.441.614.680,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.512.433.080,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 869.533.600,00, serta Belanja Modal sebesar Rp. 59.648.000,00. Realisasi anggaran belanja Dinas Ketahanan

Pangan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.129.286.559,00, sehingga persen capaian belanja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar 90,93%. Berikut capaian belanja program/kegiatan Tahun 2025 antara lain :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota mengelola anggaran sebesar Rp. 3.115.451.080,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.874.459.739,00, sehingga didapatkan capaian belanja sebesar 92,28%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota terdiri dari 6 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah anggaran Rp. 50.219.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 50.097.534,00, sehingga capaian belanja sebesar 99,76%.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran Rp. 2.591.533.080,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.374.527.122,00, sehingga capaian belanja sebesar 91,63%.
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran Rp. 219.904.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 210.819.791,00, sehingga capaian belanja sebesar 96,04%.
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran Rp. 59.648.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 56.443.500,00, sehingga capaian belanja sebesar 94,63%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran Rp. 136.805.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 126.857.292,00, sehingga capaian belanja sebesar 92,73%.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran Rp.

57.342.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 55.714.500,00, sehingga capaian belanja sebesar 97,16%.

2. Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mengelola anggaran sebesar Rp. 205.600.800,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 199.310.562,00 sehingga didapatkan capaian belanja sebesar 96,94%. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan anggaran Rp. 95.765.400,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 94.745.137,00, sehingga capaian belanja sebesar 98,93%.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota anggaran Rp. 26.126.600,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 24.072.172,00, sehingga capaian belanja sebesar 92,14%.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi anggaran Rp. 83.708.800,00 dengan realisasi belanja Rp. 80.493.253,00, sehingga capaian belanja sebesar 96,16%.

3. Pada Program Penanganan Kerawanan Pangan mengelola anggaran sebesar Rp. 88.907.600,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 24.189.542,00 sehingga didapatkan capaian belanja sebesar 27,21%. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan anggaran Rp. 9.743.600,00 dengan

- realisasi belanja sebesar Rp. 9.656.442,00, sehingga capaian belanja sebesar 99,11%.
- 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran Rp. 79.164.000,00 dengan realisasi belanja sebesar 14.533.100,00, sehingga capaian belanja sebesar 18,36%. Capaian belanja pada Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota sangat kecil. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini terdapat belanja pengadaan bibit alpukat sebanyak 400 batang untuk penanganan kerawanan pangan di 3 desa rentan rawan pangan prioritas 1-2, dengan pagu belanja sebesar Rp. 58.000.000,00. Akan tetapi belanja tersebut tidak direalisasikan karena spesifikasi belanja yang ada pada DPA tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada penyedia (pihak ke-3). Sehingga belanja tersebut tidak dilaksanakan.
4. Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan mengelola anggaran sebesar Rp. 31.655.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.326.716,00 sehingga didapatkan capaian belanja sebesar 98,96%. Program Pengawasan Keamanan Pangan ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota anggaran Rp. 31.655.200,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 31.326.716,00, sehingga capaian belanja sebesar 98,96%.

2.4 Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Bappeda Litbang, berikut beberapa inovasi yang telah dilakukan :

1) GENTAYANGAN (*Gerakan Tanam Sayuran dan Buah di Pekarangan*)

Adapun tujuan dari inovasi ini adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan sayur dan buah segar sebagai sumber zat gizi keluarga di pekarangan;
- b. Mempermudah akses terhadap sumber pangan bergizi terutama sayur dan buah segar;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya panganekaragaman konsumsi pangan dalam pemenuhan gizi keluarga.

Manfaat dari inovasi ini adalah :

- a. Keluarga dapat mengatur kebutuhan sumber gizi keluarga dengan menanam jenis sayuran dan buah yang beragam;
- b. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi dari pekarangan sendiri;
- c. Kemudahan dalam memperoleh sumber pangan bergizi dan aman bagi keluarga.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan inovasi ini adalah: pekarangan keluarga banyak dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan buah, sumber pangan sehat bagi keluarga yang sangat mudah didapat dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

2) SeRumPun (*Satu Rumah Satu Pohon Nangka*)

Program Inovasi SeRumPuN (Satu Rumah Satu Pohon Nangka) ini merupakan suatu upaya agar masyarakat memiliki ketekunan, Usaha, Keyakinan, Ulet, dan Lincah dalam mengolah dan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga menjadi produktif, sehingga dapat mengatasi

kerentanan pangan dan gizi dalam rumah tangga. Dengan Program Inovasi SeRumPuN (Satu Rumah Satu Pohon Nangka) diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama di Desa rentan rawan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3) ERAGRO (Ecer Rasa Grosir)

Adapun tujuan dan manfaat dari inovasi ini antara lain :

- a. Memberdayakan Pasar Mitra Tani Kabupaten dan Toko Mitra Tani di Kecamatan Bengkulu Selatan;
- b. Menyalurkan bahan pangan murah dengan kegiatan gelar pasar murah di tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Memperpendek rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen;
- d. Memberikan kemudahan aksesibilitas pangan kepada konsumen/masyarakat;
- e. Mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis di tingkat produsen dan konsumen.

3.5 Aktualisasi dan Implementasi Core Value BerAKHLAK

Kegiatan aktualisasi Core Values BerAKHLAK di Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

1) Pembuatan Spanduk BerAKHLAK



5) Budaya Kerja



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan kinerja ini disusun bertujuan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, atas keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan tupoksi, dan juga merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025. Dari hasil analisis kinerja Dinas Ketahanan pangan Tahun 2025, Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 **Baik** dengan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra SKPD sebesar **100%** dan Realisasi Anggaran sebesar **90,94%**. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencapai panganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- 2) Kurangnya SDM yang memadai.
- 3) Sulitnya memperoleh data terkait lintas OPD.

2. Rekomendasi

Meskipun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sudah termasuk dalam kategori Baik, namun dari hasil analisis capaian kinerja masih terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja yang telah didapatkan. Beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Komitmen bersama seluruh ASN Dinas Ketahanan Pangan akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian

- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi;
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
 3. Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat luas terkait peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
 4. Peningkatan SDM melalui diklat/bimtek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam mencapai misi organisasi.



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

HARONI, SP

Nip: 19680814-200212 1 004

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
IL. ZAINAB BAHMADA RUSTAMUJATUNYA**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA BENGKULU SELATAN

Telepon/Fax 081271351651

dinas ketahanan pangan.bs@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 12/DKP-I/14/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ir. SUSMANTO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUSNAN MULYADI

Jabatan : BUPATI BENGKULU SELATAN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju good government dan clean governance sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 20 Januari 2025



Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	92,79
		Skor PPH Konsumsi	91,60

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 293.665.290
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 90.700.000
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 34.300.000
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.514.436.592

Manna, 20 Januari 2025



Lampiran II : PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN
KEPALA DINAS

PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan AKIP pada PD	BB	-
	1) Perencanaan kinerja	24	Dari bobot 30
	2) Pengukuran kerja	24	Dari bobot 30
	3) Pelaporan kinerja	12	Dari bobot 15
	4) Evaluasi kinerja	20	Dari bobot 25
2	Jumlah inovasi yang dibangun dan dikembangkan	Minimal 1 Inovasi	Terimplementasi dengan baik
3	Penerapan dan evaluasi SPIP pada PD	Level 3	Laporan pelaksanaan SPIP
4	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Level 3	Laporan implementasi MRI
5	Terkelolanya data sektoral Perangkat Daerah	100%	Pemenuhan elemen data sektoral
6	Tata Kelola dan tindak lanjut pemeriksaan keuangan PD	TL 100%	Tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan
7	Keterbacaan Manajemen BMD	100%	Rekonsiliasi aset
8	Realisasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah	-	-
	1) Sumber Dana APBN (Bagi yang ada)	100%	Laporan Setiap Triwulan
	2) Sumber Dana APBD	100%	Laporan Setiap Triwulan
9	Partisipasi dalam Agenda Pemerintah	-	-
	1) Rapat penting DPRD	100%	Evaluasi per triwulan
	2) Rapat penting kedinasan	100%	Evaluasi per triwulan
10	Penerapan dan pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	-

Manna, 20 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA BENGKULU SELATAN

Telepon/Fax 081271351651

dinaasketahananpangan.bs@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 13/DKP-I/14/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MARWIN, S.Sos**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. SUSMANTO, MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju good government dan clean governance sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 20 Januari 2025



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

MARWIN, S.Sos
Pembina Tk.I/IVB
197203051994021001

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya nilai AKIP	Nilai AKIP OPD	80
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100
3	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Indeks kepuasan ASN	82,5

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 4.514.436.592

Manna, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS**



**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS**

MARWIN, S.Sosa
Pembina Tk. I/IVB
NIP. 197203051994021001

Lampiran II : PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN
SEKRETARIS

PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan reformasi Birokrasi pada OPD	-	-
	1) Perencanaan Kinerja	5 Dokumen	1. Perjanjian Kinerja 2. Indikator Kinerja Utama 3. Cascading 4. Pohon Kinerja 5. Rencana Aksi
	2) Pengukuran Kinerja	4 Dokumen	Laporan Pencapaian Target IKU
2	Nilai Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulan
3	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bagian (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus dipublikasi pada website OPD
4	Partisipasi dalam agenda pemerintahan	-	-
	1) Rapat penting DPRD	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
	2) Rapat penting kedinasan	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
5	Keterbukaan Informasi Publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

Manna, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KERALA DINAS

IC. SUSMANTO, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19680814 200212 1 004

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

MARWIN S. Ses
Pembina Tk. I/IVB
NIP. 197203051994021001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA BENGKULU SELATAN

Teleponi/Fax 081271351651

dinasketahananpangan.bs@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 13.A/DKP-I/14/II/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ERLIAN JONI, S.IP**

Jabatan : **KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. SUSMANTO, MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju good government dan clean governance sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS



PIHAK PERTAMA
KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

ERLIAN JONI, S.IP
Pembina/IVA
197706221998031001

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA

I. KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase angka kecukupan energy (AKE)	45
2	Terawasnya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	89,65

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 138.700.000
2.	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 34.300.000

Manna, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS**



**PIHAK PERTAMA
KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

ERLIAN JONI, S.IP
Pembina/IVA
NIP. 197706221998031001

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN
 II KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN
 PANGAN

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
 Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan reformasi Birokrasi pada OPD	-	-
	1) Perencanaan Kinerja	5 Dokumen	1. Perjanjian Kinerja 2. Indikator Kinerja Utama 3. Cascading 4. Pohon Kinerja 5. Rencana Aksi
	2) Pengukuran Kinerja	4 Dokumen	Laporan Pencapaian Target IKU
2	Nilai Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulanan
3	Pembangunan Inovasi	1 Inovasi	Minimal 1 inovasi untuk Bidang/Bagian
4	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bidang (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus dipublikasi pada website OPD
5	Partisipasi dalam agenda pemerintahan	-	-
	1) Rapat penting DPRD	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
	2) Rapat penting kedinasan	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
6	Keterbukaan Informasi Publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

Manna, 20 Januari 2025

**PIHAK PERTAMA
 KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**



ERLIAN JONI S.I.P
 Pembina/IVA
 NIP. 197706221998031001



Iq. SUSMANTO, MM
 Pembina Utama Muda/IVC
 NIP. 19680814 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA BENGKULU SELATAN

Telepon/Fax 081271351651

dinasketahananpangan.bs@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 13.B/DKP-I/141/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : OKTY FERIYENNI, S.PI, MM

Jabatan : KABID DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SUSMANTO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana terluang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju good government dan clean governance sebagaimana terluang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS


Ir. SUSMANTO, MM
Pembina Utama Muda/IVC
19660814 200212 1 004

PIHAK PERTAMA
KABID DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN


OKTY FERIYENNI, S.PI, MM
Pembina/IVA
197910132002122001

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA
I KABID DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di Tk. Produsen/Konsumen	100

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 140.585.200

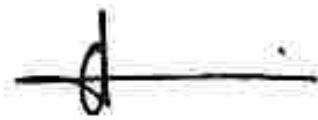
Manna, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS



Ir. SUSMANTO, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19680814 200212 1 004

PIHAK PERTAMA
KABID DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN



OKTY FERİYENNI, S.Pi. MM
Pembina/IVA
NIP. 197910132002122001

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN
 II KABID DISTRIBUSI DAN CADANGAN
 PANGAN

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
 Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan reformasi Birokrasi pada OPD	-	-
	1) Perencanaan Kinerja	5 Dokumen	1. Perjanjian Kinerja 2. Indikator Kinerja Utama 3. Cascading 4. Pohon Kinerja 5. Rencana Aksi
	2) Pengukuran Kinerja	4 Dokumen	Laporan Pencapaian Target IKU
2	Nilai Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulanan
3	Pembangunan Inovasi	1 inovasi	Minimal 1 inovasi untuk Bidang/Bagian
4	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bidang (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus dipublikasi pada website OPD
5	Partisipasi dalam agenda pemerintahan	-	-
	1) Rapat penting DPRD	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
	2) Rapat penting kedinasan	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
6	Keterbukaan Informasi Publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

Manna, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
 KEPALA DINAS**



Ir. SUSMANTO, MM
 Pembina Utama Muda/IVC
 NIP. 19680814 200212 1 004

**PIHAK PERTAMA
 KABID DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**



OKTY FERiyENNI, S.Pi, MM
 Pembina/IVA
 NIP. 197910132002122001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA BENGKULU SELATAN

Telp/Fax 081271351651

dinaskelahanpangan.bs@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 13.C/DKP-1/14/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MITA ARYANTI, SH

Jabatan : KABID KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SUSMANTO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju good government dan clean governance sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS


Ir. SUSMANTO, MM
Pembina Utama Muda/IVC
19680814 200212 1 004

PIHAK PERTAMA
KABID KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN



MITA ARYANTI, SH
Penela Tk.I/IIIID
198705092010012002

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA
KABID KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Tertanganinya kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	15,79

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 14.400.000
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 90.700.000

Manna, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS**


Ir. SUSMANTO, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19680814 200212 1 004

**PIHAK PERTAMA
KABID KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAI**


MITA ARYANTI, SH
Penata Tk.IIIID
NIP. 198705092010012002

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN
 II KABID KETERSEDIAAN DAN
 KERAWANAN PANGAN

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
 Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan SAKIP dan reformasi Birokrasi pada OPD	-	-
	1) Perencanaan Kinerja	5 Dokumen	1. Perjanjian Kinerja 2. Indikator Kinerja Utama 3. Cascading 4. Pohon Kinerja 5. Rencana Aksi
	2) Pengukuran Kinerja	4 Dokumen	Laporan Pencapaian Target IKU
2	Nilai Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Laporan Triwulanan
3	Pembangunan Inovasi	1 Inovasi	Minimal 1 Inovasi untuk Bidang/Bagian
4	Kelengkapan dokumen administrasi kinerja bidang (SOP, KAK)	1 Laporan	Harus dipublikasi pada website OPD
5	Partisipasi dalam agenda pemerintahan	-	-
	1) Rapat penting DPRD	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
	2) Rapat penting kedinasan	70 %	Untuk acara yang mengundang Pejabat Administrator
6	Keterbukaan Informasi Publik	1 website	Publikasi aktivitas kedinasan

Manna, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
 KEPALA DINAS**


Ir. SUSMANTO, MM
 Pembina Utama Muda/IVC
 NIP. 19680814 200212 1 004

**PIHAK PERTAMA
 KABID KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**


MITA ARYANTI, SH
 Penata Tk.I/III D
 NIP. 198705092010012002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA BENGKULU SELATAN

Telepon/Fax 081271351651

dinasketahananpangan.bs@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 14.A/DKP-I/14/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIZARLIN SUFSIDI, SE

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MARWIN, S.Sos

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan *Pihak Pertama*, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target, kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NIZARLIN SUFSIDI, SE

Penata Tk.I/III D

NIP. 197610012006041004

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

MARWIN, S.Sos

Pembina TK.IV/B

NIP. 197203051994021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Tahun : 2025
Anggaran :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1
3	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1
4	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1
5	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1
6	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang kegiatan OPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3
7	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di OPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1
8	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1
9	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	30
10	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya di OPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	12
11	Tertaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1
12	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.000.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.050.000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 20.515.000
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 6.722.800
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 47.280.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 189.579.000
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 45.218.000
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 28.005.000
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 124.800.000
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Rp. 82.983.000
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 8.120.000
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 12.000.000

Manna, 21 Januari 2025

Plhak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NIZARLIN SUFISUL SE
Penata Tk.I/III
NIP. 197610012006041004


MARWAN S Soa
Pembina Tk.IV/B
NIP. 197203051994021001